



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NOMOR **02** TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan sengketa informasi publik nomor 042/IX/KIP-PSI/2021 yang diajukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) mengenai informasi atas Keputusan Presiden Nomor 78/TK Tahun 2021, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa, tanggal 4 Agustus 2021 di Komisi Informasi Pusat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pengujian konsekuensi dapat dilakukan pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner;
- c. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- d. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- e. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan e, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang . . .



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Dewan Gelar Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
8. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Sekretariat Negara;
9. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

11. Peraturan . . .



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **13** September 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA SELAKU
PENGARAH/ATASAN PPID
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,

SETYA UTAMA